

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dunia usaha yang semakin berkembang dengan pesat menuntut perusahaan untuk selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru agar mampu menghadapi persaingan dunia usaha. Cara pandang yang demikian di setiap perusahaan khususnya di Indonesia baik yang bergerak di bidang sektor keuangan, manufaktur, pertanian, perkebunan, jasa, perdagangan, badan usaha milik negara/daerah dan lainnya mendorong perusahaan untuk selalu dapat bertahan dari setiap masalah yang ada baik dari sistem tata kelola perusahaan maupun fungsi pengawasan terhadap aset perusahaan, kegiatan operasional maupun manajemen. Maka dari itu, diperlukan upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi perbaikan pengendalian internal secara terus-menerus, keterlibatan aktif dari fungsi pengawasan serta keekonomi, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan perusahaan (Gumilang, 2010).

Perkembangan ini menyebabkan masalah yang dihadapi perusahaan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi kegiatan dan aktivitas operasi perusahaan agar terhindar dari segala penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, serta kecurangan. Maka dari itu, untuk

mengatasi berbagai ancaman ini harus diberdayakan secara konsisten fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian. risiko manajemen, sistem pengendalian internal, dan implementasi tata kelola perusahaan yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup usaha.

Pelaksanaan pengendalian dapat dilakukan secara langsung oleh perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu departemen audit internal yang dibentuk oleh manajemen dan diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern perusahaan (Gumilang, 2010). Pengendalian internal dengan dibantu oleh audit internal merupakan proses untuk mencapai tujuan perusahaan, yang diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai.

Pelaksanaan pengawasan internal serta implementasi sistem pengendalian internal juga tidak lepas dari peran seorang komite audit. menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang komite audit bagi BUMN dalam Pasal 3 ayat 1 salah satunya dijelaskan tentang tugas seorang komite audit yaitu, “membantu dewan komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.”

Keterlibatan aktif komite audit dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan internal dengan mengawasi bagaimana implementasi internal control oleh manajemen serta rekomendasi auditor internal yang dapat

mendorong timbulnya lingkungan pengendalian yang baik, sehingga *good corporate governance* yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia usaha, adanya perbaikan *governance* sangat menentukan minat investasi dan lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi pemicu berbagai masalah, karena dewasa ini GCG sudah menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang vital sebagai suatu pertanggung jawaban suatu pelaku bisnis tersebut atas tindakannya. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Muliaman (2014) tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Di Indonesia ada beberapa kasus akibat lemahnya internal control dan fungsi pengawasan perusahaan yang menimpa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbuka (Tbk), yaitu tentang kasus dugaan mark-up laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. Adanya pengelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. Tahun 2001 senilai Rp 32,668 miliar, karena laporan keuangan yang seharusnya sebesar Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar) menjadi masalah besar dalam perusahaan ini. Hal ini jelas terlihat lemahnya *internal control*, fungsi audit internal dan tidak berfungsinya komite audit yang ada pada PT. Kimia Farma Tbk. tersebut.

Kasus lain adalah kasus yang dialami oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari tiap-tiap organ

pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Fakta dari kasus PT. KAI menjadi bukti lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai macam skandal keuangan pada bisnis perusahaan, yaitu pengungkapan yang akurat dan transparan. Fakta lain dari kelemahannya yang terlihat adalah minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengendalian internal atas aktivitas manajemen oleh komite audit dan auditor.

Keberadaan komite audit, audit internal dan sistem pengendalian internal yang memadai sangat penting dalam menciptakan *good corporate governance* dan diharapkan akan bisa diterima di masyarakat terutama bagi perusahaan yang *go public*. Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diajukan ialah **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PERAN KOMITE AUDIT DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (SURVEI DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Tbk.)”** Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, peran komite audit dan audit internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan BUMN di Kota Bandung yaitu PT. Perkebunan Nusantara VIII sebagai objek penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diajukan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?
2. Apakah terdapat pengaruh peran komite audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?
3. Apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?
4. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, peran komite audit dan audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari peran komite audit terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat sistem pengendalian internal, komite audit dan audit internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pembanding untuk penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh sistem pengendalian internal, peran komite audit dan audit internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat bagi praktik bisnis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perusahaan terutama individu yang ada di dalam sistem pengendalian internal, komite audit dan audit internal untuk dapat lebih mengenali dan peka terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan dan mampu menarik minat investor untuk menanamkan investasinya maupun perbankan untuk memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

3. Manfaat bagi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil dimasa yang akan datang, serta dapat merumuskan & mengevaluasi bagaimana peraturan GCG di terapkan dalam perusahaan di Indonesia

